

## **ANALISIS DAMPAK PENGGUNAAN PLAT KENDARAAN BERMOTOR PRIBADI LUAR DAERAH TERHADAP PENDAPATAN PAJAK DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH**

Yanti Arnilis<sup>1\*</sup>, Syafridha Yanti<sup>2</sup>, Harry Fauzi<sup>3</sup>

Universitas Muhammadiyah Mahakarya Aceh, Indonesia<sup>1,2</sup>

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Aceh Tengah, Indonesia<sup>3</sup>

Corresponding Author : [yantiarnelis93@gmail.com](mailto:yantiarnelis93@gmail.com), [syafridhayanti@gmail.com](mailto:syafridhayanti@gmail.com), [harryrahmi18@gmail.com](mailto:harryrahmi18@gmail.com)

### **History:**

Received : 25 Februari 2024

Revised : 10 Maret 2024

Accepted : 23 April 2024

Published : 25 Mei 2024

**Publisher:** Fakultas Hukum Universitas Darma Agung

**Licensed:** This work is licensed under

[Attribution-NonCommercial-ShareAlikeCCBY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)



### **Abstrak**

Kendaraan bermotor merupakan suatu kebutuhan sekunder yang saat ini di wilayah Provinsi Aceh menjadi suatu kebutuhan yang wajib, karena dapat dilihat dari tingkat kendaraan yang sangat meningkat pesat. Dengan peningkatan kendaraan yang begitu pesat tentu meningkat pula pajak pendapatan daerah dari kendaraan bermotor, dalam hal ini tentu kendaraan yang dimiliki oleh masyarakat Provinsi Aceh haruslah Plat Aceh. Tetapi pada saat ini banyak kendaraan yang di Aceh Tengah memiliki kendaraan yang memakai plat luar daerah. Dalam penelitian ini akan membahas dampak pemakaian plat kendaraan luar daerah terhadap pendapatan pajak daerah dari kendaraan bermotor. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak pendapatan pajak daerah dari plat kendaraan bermotor yang diluar daerah. Pengaruh kendaraan bermotor pribadi plat nomor luar daerah menjadi suatu hal yang tidak dapat di abaikan oleh pemerintahan Provinsi Aceh karena hal ini dapat berpengaruh terhadap pendapatan pajak daerah dari kendaraan bermotor

**Kata Kunci:** Penggunaan Plat Kendaraan Bermotor, Luar Daerah, Pendapatan Pajak Daerah

### **Abstract**

*Motorized vehicles are a secondary need which currently in the Aceh Province region has become a mandatory need, as can be seen from the rapidly increasing level of vehicles. With the rapid increase in vehicles, of course the regional income tax from motorized vehicles will also increase, in this case of course the vehicles owned by the people of Aceh Province must have Aceh plates. However, currently many vehicles in Central Aceh have vehicles that use out-of-region plates. This research will discuss the impact of using out-of-region vehicle plates on regional tax revenues from motorized vehicles. The aim of this research is to determine the impact of regional tax revenues from motor vehicle plates outside the region. The influence of private motorized vehicles with out-of-region license plates is something that cannot be ignored by the Aceh Provincial government because this can affect regional tax revenues from motorized vehicles.*

**Keywords:** Use of Motor Vehicle Plates, Outside the Region, Regional Tax Revenue

## **PENDAHULUAN**

Berdasarkan penjelasan dari undang-undang nomor 28 tahun 2009 ditekankan bahwa pajak daerah adalah kewajiban bagi rakyat yang menetap di daerah tersebut untuk membayar pajak yang berguna untuk kepentingan keperluan dalam daerah tersebut. Keperluan daerah tersebut dapat diartikan membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah. dalam perkembangannya pajak daerah yang semula hanya memiliki fungsi untuk mengisi kas daerah dalam APBD beralih menjadi fungsi mengatur yang bertujuan agar pemerintah daerah dapat melakukan pelayanan kepada masyarakat (Resmi et al., 2021). Pajak kendaraan bermotor (PKB) merupakan salah satu pajak daerah yang mendorong pendapatan asli daerah (PAD), PKB ini dibebankan kepada pemilik dari kendaraan bermotor tersebut (Dilla, 2020). PKB menerapkan earmarketing system yang merupakan jumlah prosentase dari pendapatan PKB tersebut dalam suatu daerah diperuntukan untuk mendanai suatu program yang spesifik. Pendapatan dari PKB ini diperuntukkan untuk penggunaan jalan atau jasa sarana jalan di dalam daerah, yang menikmati hasil dari pembanunan tersebut tentunya masyarakat daerah yang memakai jalan tersebut. Pada prinsipnya earmarketing system ini dapat memudahkan pengawasan penggunaan pajak yang telah dibayarkan karena memiliki output yang jelas sudah terprogram (Bintary, 2020). Dalam undang-undang tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah dijelaskan bahwa pembayaran PKB akan menjadi pemasukan bagi pemerintah daerah dan akan dibagikan kepada pemerintah kabupaten / kota sebanyak 30 % dan diperuntukkan paling sedikit 10% dari hasil PKB termasuk yang dibagikan untuk kabupaten / kota tersebut digunakan untuk pemeliharaan jalan (Tappi, 2017). Salah satu dampak dari penurunan PAD daerah didasarkan pada adanya ketentuan dari Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 yang menjelaskan bahwa peraturan pelaksanaannya mengatur PKB sebagai kepemilikan kendaraan bermotor di daerah tempat terdaftar dan merupakan pajak untuk daerah terdaftarnya. Hal ini dapat menjadi dampak pengaruh bagi PAD daerah Kabupaten Aceh Tengah dengan kendaraan plat nomor luar daerah yang beroperasi pada wilayah Kabupaten Aceh Tengah (Amah et al., 2021).

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa PKB sangat mendorong PAD untuk pembangunan daerah khususnya di Kabupaten Aceh Tengah, tetapi saat ini banyak kendaraan yang memakai plat nomor kendaraan yang dari daerah luar, yang tentunya akan sangat mempengaruhi dari segi PAD daerah Kabupaten Aceh Tengah. Dengan rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Aceh Tengah maka akan berdampak pada pembangunan jalan yang diperuntukan untuk pemakai umum masyarakat Kabupaten Aceh Tengah serta keperluan lain daerah yang dapat dibangun dari PAD yang didapatkan salah satu nya dengan adanya pemungutan wajib pajak kendaraan bermotor kepada penguasa atau pemilik kendaraan.

Dari penjelasan diatas dapat dimpulkan bahwa PKB sebagai pendorong peningkatan PAD sangat penting untuk diteliti, agar masyarakat tidak hanya memetingkan kenyamanan pribadi saja tetapi pementingkan pembangunan daerah yang salah satu sumber pendapatannya adalah dari PKB yang diwajibkan kepada masyarakat yang memiliki hak milik dan penguasaan terhadap kendaraan bermotor yang sat ini masih menggunakan plat nomor luar daerah (Sepriana, 2021).

Tujuan dari pembangunan nasional Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan rakyat Indonesia untuk menjadi yang lebih baik, dilihat dari kehidupan masyarakat Indonesia yang masih berkembang tentunya pembangunan nasional haruslah diperhatikan dengan ketat mulai dari pembangunan dibidang ekonomi, bidang hukum, bidang budaya dan bidang lainnya (Dharmakarja et al., n.d.). Oleh karena itu pembangunan tersebut haruslah dilakukan efektif dan evesian agar terpenuhi tujuan dari pembangunan nasional dari berbagai bidang tersebut (Permata Sari et al., 2019).

Sesuai dengan kebijakan desentralisasi yang tercantum dalam Undang-UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai bentuk deregulasi baru Diharapkan dengan perubahan kebijakan tentang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terjadi pendelegasian wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, serta implementasi kebijakan yang lebih fokus dan terarah sehingga meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerjanya (Supriyono et al., 2021).

Oleh karena itu dalam penelitian ini akan membahas bagaimana implementasi pajak kendaraan bermotor dan bagaimana dampak terhadap kendaraan bermotor yang memakai plat nomor luar daerah terhadap pendapatan daerah (Ashari & Susilowati, 2023). adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementsi peraturan pajak kendaraan bermotor dengan menggunakan plat luar daerah di kabupaten Aceh Tengah?
2. Bagaimanakah dampak penggunaan plat kendaraan bermotor pribadi luar daerah terhadap pendapatan pajak daerah?

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian adalah rangkaian langkah sistematis untuk memecahkan suatu rangkaian sebab akibat dan menemukan jawaban ilmiah terhadap permasalahan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Yuridis yaitu serangkaian perilaku mengamati, mendeskripsikan, dan/atau menyusun kembali suatu objek dengan menggunakan parameter hukum sebagai standar guna menarik suatu kesimpulan terhadap objek tersebut terhadap hukum Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yang artinya adalah mengungkapkan peraturan perundang-

undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian (Kholifatul, 2021).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hukum Pajak Kendaraan Bermotor**

Hukum pajak merupakan keseluruhan dari peraturan – peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat melalui pajak (Munawaroh, n.d.). Sebagaimana diketahui bahwa untuk berjalannya suatu administrasi Negara maka diperlukan dana, di Indonesia sendiri salah satu pemasukan dana yaitu dengan adanya pemungutan pajak oleh pemerintah terhadap warga Negara yang berdasarkan kepada undang – undang yang berlaku, pada undang – undang dasar 1945 pada pasal 23 ayat 2 menyatakan bahwa agar setiap pajak yang akan dipungut haruslah berdasarkan undang-undang yang mana ketentuan tersebut berbunyi “pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan undang – undang” (Rifana et al., 2021).

Salah satu bentuk pemungutan pajak adalah pajak daerah dari kendaraan bermotor. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah menegaskan bahwa “ pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Menurut Rochmat Sumitro Pajak lokal atau daerah adalah pajak yang dipungut oleh daerah – daerah swatantra, seperti provinsi, kotapraja, kabupaten dan sebagainya. Sedangkan menurut Yasin pajak daerah merupakan pungutan daerah yang kewenangannya ada pada daerah dan pembangunan daerah (Daparhita & Gorda, 2018). Dalam literatur pajak, pajak dapat diklasifikasikan berdasarkan golongan, wewenang pemungut dan sifatnya. Pajak daerah termasuk klasifikasi pajak menurut wewenang pemungutannya, artinya pihak yang berwenang dan berhak memungut pajak daerah yaitu pemerintah daerah. menurut Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pajak – pajak yang termasuk pajak provinsi adalah salah satunya yaitu pajak kendaraan bermotor yaitu wajib pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor (Sulthoni, 2016). Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat – alat berat dan alat – alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air (Rohmah & Herwinarni, 2018).

## B. Pendapatan Daerah dari pajak Bermotor

Menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 5 dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor adalah hasil perkalian dari dua unsur pokok :

1. Nilai objek pajak, dan
2. Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor. Bobot kendaraan bermotor yang mencerminkan kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan didasarkan pada tekanan gandar kendaraan, jenis bahan bakar kendaraan bermotor, dan jenis-jenis penggunaan, tahun pembuatan, serta ciri-ciri kendaraan bermotor. Khusus untuk kendaraan bermotor yang digunakan diluar jalan umum, termasuk alat-alat besar serta kendaraan dia air, dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor adalah nilai jual kendaraan bermotor. Nilai jual kendaraan bermotor ditentukan berdasarkan harga umum atas suatu kendaraan bermotor (Risawati, 2020).

Pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 telah ditentukan besaran tarif pajak kendaraan bermotor yang dapat ditetapkan oleh pemerintah daerah untuk masing-masing jenis pajak daerah. Tarif pajak kendaraan bermotor ditetapkan paling tinggi 2,75 % dengan rincian sebagai berikut :

1. Tarif pajak kendaraan bermotor untuk kendaraan bermotor pribadi kepemilikan pertama ditetapkan paling tinggi sebesar 1,5 %
2. Tarif pajak kendaraan bermotor untuk kendaraan bermotor pribadi kepemilikan kedua 2 %, ketiga 2,25 %, keempat 2,5 % dan kelima 2,75 % dikali PKB.
3. Tarif pajak kendaraan bermotor untuk kendaraan bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, social keagamaan, lembaga social dan keagamaan , lembaga social dan pemerintah/TNI/Polri, pemerintah daerah dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan peraturan daerah ditetapkan paling tinggi sebesar 0,5 % dikali dasar pengenaan PKB.
4. Tarif pajak kendaraan bermotor untuk alat – alat berat dan alat – alat besar ditetapkan paling tinggi sebesar 1,2 %.

Salah satu dampak yang menguntungkan dari pembayaran pajak ini adalah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) yaitu pendapatan yang diperoleh daerah dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah yang sah. Dengan semakin banyaknya pendapatan asli dari daerah maka daerah tersebut dengan sendirinya mampu mengelola keuangan daerah dan menjadikan daerah tersebut mampu

mandiri dengan mengalokasikan keuangan pajak untuk pembangunan daerah dan lain sebagainya (Madjodjo & Baharuddin, 2022b).

### C. Analisis Dampak Penggunaan Plat Kendaraan Bermotor Pribadi Luar Daerah Terhadap Pendapatan Pajak Daerah

Dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah dalam melaksanakan pemungutan pajak nyatanya dalam prakteknya masih sulit untuk dilakukan karena adanya beberapa objek pungutan yang belum dapat dijangkau dari landasan peraturan yang tidak memungkinkan untuk dikenakan pungutan terhadap objek pajak tersebut yaitu kendaraan yang dikuasai atau dimiliki provinsi lain yang beroperasi pada wilayah provinsi Aceh (Salmah, 2018).

Dari penjelasan tersebut diatas yang menjelaskan bahwa pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu pendapatan daerah tidak sedikit pula permasalahan yang muncul. Pemasalahan yang muncul saat ini adalah banyak wajib pajak yang memiliki kendaraan bermotor yang berplat luar daerah yang mana pajak dari kendaraan tersebut dibayarkan kepada daerah lain atau diluar provinsi Aceh. Hal ini dapat berakibat turunya Pendapatan Asli Daerah Provinsi Aceh (Putri & Septriana, 2020).

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang petunjuk pelaksanaan pajak Aceh, dalam pasal 12 ayat (1) menyebutkan bahwa kendaraan Non BL yang beroperasi lebih dari 3 bulan dalam wilayah Aceh harus dilaporkan kepada kantor bersama SAMSAT dimana kendaraan tersebut beroperasi (Ashari & Susilowati, 2023). Artinya disisi setiap kepemilikan kendaraan bermotor diluar wilayah Aceh wajib menjalankan balik nama kepemilikannya atas kendaraan tersebut (Wahyuni, 2019).

Dibahas lebih lanjut pada pasal 12 ayat (2) yang menegaskan bahwa kendaraan plat luar daerah yang beroperasi selama 12 bulan belum melaporkan maka wajib memutasikan kendaraannya (Madjodjo & Baharuddin, 2022a). Namun sampai saat ini masih banyak kendaraan yang masih memakai plat luar, disini perlu adanya tindakan pemerintah dalam pelaksanaan peraturan – peraturan tersebut (Sari, 2021).

## **SIMPULAN**

Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan pembangunan daerah, dengan lahirnya peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2018 dijelaskan dalam pasal 12 ayat (1), menegaskan bahwa setiap plat kendaraan luar daerah wajib melaporkan selama tiga bulan berada pada lintas wilayah Aceh, dan dijeaskan lebih lanjut pada ayat (3) maka yang tidak melaporkan akan diwajibkan memutasikan kendaraan tersebut. Dalam hal ini pemerintahan mewajibkan dalam balik nama kendaraan bermotor yang berada di wilayah Aceh. Namun sampai saat ini masih banyak

kendaraan yang berplat luar yang pemiliknya merupakan masyarakat Aceh, hal ini agar dapat menjadi perhatian untuk menentukan pendapat asli daerah Aceh, sehingga pembangunan di Aceh dapat terlaksana dengan baik.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Amah, N., Rustiarini, N. W., & Hatmawan, A. A. (2021). Tax Compliance Option During The Pandemic: Moral, Sanction, And Tax Relaxation (Case Study Of Indonesian Msmes Taxpayers). *Review Of Applied Socio-Economic Research*, 22(2), 21–36. <https://doi.org/10.54609/Reaser.V22i2.108>
- Ashari, M. A., & Susilowati, D. (2023). Effect Knowledge Of Zakat As A Tax Deduction, Subjective Norma, And Behavior Control On Taxpayer Compliance Intentions. *Jurnal Investasi*, 9(1), 24–35.
- Bintary, A. A. (2020). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Pada Kantor Bersama Samsat Jakarta Timur Tahun 2015-2018. *Jurnal Pajak Vokasi (Jupasi)*, 1(2), 86–101. <https://doi.org/10.31334/jupasi.V1i2.816>
- Daparhita, I. B. A., & Gorda, A. (2018). Efektivitas Pemberlakuan Tarif Progresif Bagi Pajak Kendaraan Bermotor Guna Meningkatkan Penerimaan Pajak. *Jurnal Analisis Hukum*, 1(1), 92–113.
- Dharmakarja, I. G. M. A., Faturahman, M. Z., Putri, R. A., & Sunsatyasih, T. R. (N.D.). Studi Keuangan Publik: Analisis Penyediaan Barang Publik Di Dki Jakarta. *Bunga Rampai Akuntansi Pemerintah Indonesia Kontemporer*, 38.
- Dilla, A. C. (2020). Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (Pkb) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kota Pematangsiantar (Studi Kasus Pada Kantor Bersama Samsat/Uppd Pematangsiantar). Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Kholifatul, M. (2021). Analisis Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus: Samsat Purwokerto Uppd Kabupaten Banyumas). Iain Purwokerto.
- Madjodjo, F., & Baharuddin, I. (2022a). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm. *Gorontalo Accounting Journal*, 5(1), 50–67.
- Madjodjo, F., & Baharuddin, I. (2022b). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm. *Gorontalo Accounting Journal*, 5(1), 50. <https://doi.org/10.32662/Gaj.V5i1.1979>
- Munawaroh, K. (N.D.). Analisis Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus: Samsat Purwokerto Uppd Kabupaten Banyumas).
- Permata Sari, D., Bayu Putra, R., Fitri, H., Ramadhanu, A., & Cahyani Putri, F. (2019). Pengaruh Pemahaman Pajak, Pelayanan Aparat Pajak, Sanksi Perpajakan Dan

- Preferensi Risiko Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak( Studi Kasus Umkm Toko Elektronik Di Kecamatan Sitiung Dharmasraya). *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis*, 1(2), 18–22. <https://doi.org/10.47233/jteksis.V1i2.46>
- Putri, B. N., & Septriana, I. (2020). Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam Memenuhi Kewajibannya Melalui Pemeriksa Pajak, Kesadaran Dan Kualitas Pelayanan Pada Kpp Pratama Semarang Barat. *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*, 5(1), 1–15. <https://doi.org/10.33633/jpeb.V5i1.3229.G1868>
- Resmi, S., Pahlevi, R. W., & Sayekti, F. (2021). Implementation Of Financial Report And Taxation Training: Performance Of Msmes In Special Regions Yogyakarta. *Jurnal Siasat Bisnis*, 25(1), 57–68. <https://doi.org/10.20885/jsb.Vol25.Iss1.Art5>
- Rifana, D. A., Kusuma, I. L., & Tho'in, M. (2021). Analisis Pengaruh Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Dan Penerapan E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kpp Pratama Surakarta. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 22(1), 313. <https://doi.org/10.29040/jap.V22i1.2792>
- Risawati, R. (2020). Analysis Of Factors Affecting Online Store Tax Paying Compliance. *Journal Of Industrial Engineering & Management Research*, 1(1b), 212–218. <https://doi.org/10.7777/jiemar.V1i1b.228>
- Rohmah, D. N., & Herwinarni, Y. (2018). Pengaruh Norma Subjektif, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Samsat Kabupaten Pemalang. *Permana: Jurnal Perpajakan, Manajemen, Dan Akuntansi*, 10(1).
- Salmah, S. (2018). Pengaruh Pengetahuan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb). *Inventory: Jurnal Akuntansi*, 2(1), 151. <https://doi.org/10.25273/V1i2.2443>
- Sari, N. G. A. D. P. (2021). Pengaruh Program Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Sosialisasi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Denpasar. Universitas Mahasaraswati Denpasar. <https://eprints.unmas.ac.id/id/eprint/217>
- Sepriana, R. (2021). Tax Avoidance On Poultry Business Owners In Blitar Regency, East Java Province. *International Journal Of Accounting & Finance In Asia Pasific*, 4(1), 51–59. <https://doi.org/10.32535/ijafap.V4i1.1032>
- Sulthoni, K. Y. (2016). Pelaksanaan Penerbitan Plat Nomor Kendaraan Pilihan Bagi Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Lampung. <http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/21423>
- Supriyono, A., Utami, I., & Muktiyanto, A. (2021). Exploration Of Tax Compliance Determination On Micro, Small And Medium Enterprise. *Jurnal Akuntansi*, 11(1), 33–52. <https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.11.1.33-52>



Tappi,

- V. P. (2017). Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi Papua. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 8(1), 74–84.
- Wahyuni, S. (2019). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Dimensi Keadilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm. *Jad: Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan Dewantara*, 2(2), 71–81.